

**Analysis of the Effect of Education, Population,
Employment, Minimum Wages on Poverty in Riau
Province 2017-2021**

**Analisis Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk, Tenaga
Kerja, Upah Minimum, terhadap Kemiskinan Provinsi
Riau Tahun 2017- 2021**

Mayang Umi Pertiwi^{1*}, Eni Setyowati^{2*}

¹ business economy, University Muhammadiyah Surakarta ,

² bussines economy, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract. This study entitled the effect of education, population, employment and district minimum wages on poverty in Riau Province in 2017-2021. This study aims to determine the magnitude of the effect of the dependent variable on the independent variable. The data analysis method used is panel data using Eviews 8. From the data it can be concluded that the variables of education, population, employment, district minimum wages affect the poverty variable. Partially, the population variable has a positive effect on the poverty variable, and the district minimum wage has a negative effect on poverty.

Keywords: Poverty, Education, Minimum Wage

Abstrak. Penelitian ini berjudul pengaruh pendidikan, jumlah penduduk, tenaga kerja dan upah minimum kabupaten terhadap Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2017-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Metode analisis data yang digunakan adalah data panel menggunakan Eviews 8. Dari data disimpulkan bahwa variabel pendidikan, jumlah penduduk, tenaga kerja, upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap variabel kemiskinan. Secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap variabel kemiskinan, dan upah minimum kabupaten berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pendidikan, Upah Minimum

Pendahuluan

Kemiskinan terus menjadi fenomena sepanjang sejarah Indonesia, kemiskinan menjadikan para jutaan anak-anak tidak merasakan pendidikan yang berkualitas, kurangnya lapangan pekerjaan, dan tidak meratanya pendapatan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Pemerintah Indonesia memiliki perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan selalu menyertakan upaya pengentasan kemiskinan di dalamnya [1].

Istilah kemiskinan sering disebut ketika terjadi ketidakmampuan masyarakat atas standar kehidupan sehari-hari dan dipahami dengan keadaan kekurangan uang untuk kelangsungan hidup yang terjamin. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya [2].

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya yang berupa minyak bumi, gas, emas, maupun hasil hutan dan perkebunannya sehingga menjadikan Riau sebagai salah satu provinsi yang kaya di nusantara. Namun, meskipun sumber daya alam Riau melimpah, masih banyak masyarakat Riau yang tergolong masyarakat miskin. Tabel 1 memperlihatkan persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2017-2021.

Tabel 1
Tingkat Kemiskinan di Riau Periode 2017-2021 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	9,97	9,92	9,56	8,91	8,97
Indragiri Hulu	6,94	6,30	6,06	5,96	6,18
Indragiri Hilir	7,70	7,05	6,54	5,93	6,18
Pelalawan	10,25	9,73	9,62	9,16	9,63
Siak	5,80	5,44	5,03	5,09	5,18
Kampar	8,02	8,18	7,71	7,38	7,82
Rokan Hulu	10,91	10,95	10,53	10,31	10,40
Bengkalis	6,85	6,22	6,27	6,40	6,64
Rokan Hilir	7,88	7,06	7,01	6,72	7,18
Kepulauan Meranti	28,99	27,79	26,93	25,28	25,68
Pekanbaru	3,05	2,85	2,52	2,62	2,83
Dumai	4,57	3,71	3,56	3,16	3,42

Sumber: BPS Riau 2021, data diolah

Tabel 1 memperlihatkan bahwa sebagian besar di daerah Provinsi Riau sudah menekan angka kemiskinan. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan paling signifikan, yaitu 28,99 persen di tahun 2017 menjadi 25,68 persen di tahun 2021, dan menjadi kabupaten paling tinggi tingkat kemiskinan di tahun 2021. Kota Pekanbaru berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 3,05 persen di tahun 2017 menjadi 2,83 persen di tahun 2021 sehingga menjadi kota yang memiliki tingkat kemiskinan paling rendah di Provinsi Riau pada tahun 2021.

Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi di beberapa kabupaten. Kabupaten Pelalawan misalnya, pada tahun 2019 memiliki tingkat kemiskinan 9,62 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 9,16 persen. Selanjutnya tahun 2021 kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 9,63 persen. Fluktuasi ini menjadikan kabupaten Indragiri Hilir menjadi kabupaten yang memiliki peningkatan kemiskinan paling tinggi di tahun 2021.

Soemardjan (2020) menyatakan bahwa kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dialami oleh beberapa golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka [3]. Niemietz (2013) menyatakan bahwa kemiskinan di sebabkan karena ketidakmampuan seseorang dalam membeli barang kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, papan dan obat-obatan [4].

Lubis (2015) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor alamiah kondisi lingkungan masyarakat miskin, pendidikan yang tidak memadai dan faktor non-alamiah akibat kesalahan kebijakan ekonomi seperti korupsi, pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal dan stabil [5]. Mubyarto (2020) menyatakan bahwa kondisi kemiskinan salah satu faktornya adalah berasal dari kesalahan orang miskin itu sendiri yang biasanya hidup boros, di sisi lain kesalahan bersumber dari tekanan-tekanan kebutuhan ekonomi yang tidak bisa dielakkan masyarakat miskin, sehingga menyebabkan mereka terpaksa memilih dan memanfaatkan kredit yang di peroleh bukan untuk kegiatan produktif melainkan kegiatan konsumtif [3].

Radosavljevic et al., (2021) menyatakan strategi pembangunan menjadi tindakan masyarakat dan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas, perbaikan infrastruktur,

pendidikan dan kesehatan, strategi pembangunan dianggap bersifat endogen dan tahan lama[6].

Trisnu & Sudiana (2019) meneliti pengaruh pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi non perilaku. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel bebas yang dominan mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali adalah variabel pertumbuhan penduduk [7].

Erlando et al., (2020) meneliti tentang inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan: bukti dari Indonesia bagian timur dengan pendekatan model kausalitas bivariat VAR Toda-Yamamoto dan Dynamic Panel Vector Autor Regresssion (PVAR) dengan hasil adanya hubungan positif antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi dengan hubungan negatif pada ketimpangan dan kemiskinan [8].

Setyowati & Rahayu (2020) meneliti tentang peran lembaga keuangan mikro syariah dalam penanggulangan kemiskinan dengan metode logit, dengan hasil variabel yang berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan adalah pendapatan, jumlah tanggungan dan pelatihan yang diikuti [9].

Sule et al., (2022) meneliti tentang hubungan antara kemiskinan energi, kematian dibawah 5 tahun, dan ketimpangan dalam pendidikan dengan didasarkan pada kointegrasi panel, kausalitas dan kuadrat terkecil biasa yang dimodifikasi sepenuhnya (FMOLS). Hasil penelitian menunjukkan adanya kointegrasi antara kemiskinan energi, kematian balita serta ketimpangan pendapatan [10].

Khan et al., (2022) meneliti tentang hubungan antara kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan jejak ekologis (EFP) dengan pendekatan kesalahan standar Driscoll Kraay (D-K) dengan hasil jumlah penduduk miskin berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dalam hal EFP [11].

Tinjauan Pustaka

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Suatu negara memprioritaskan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan pengetahuan ilmu bagi anak-anak serta dapat mengurangi keterbelakangan dan ketertinggalan pada suatu daerah. Pendidikan dipandang sebagai investasi yang hasilnya dapat dilihat di beberapa tahun kedepan [7]. Seseorang yang tingkat pendidikannya tinggi dianggap dapat memiliki pekerjaan di tingkat yang tinggi dibanding dengan seseorang yang berpendidikan rendah [12]. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mendorong produktivitas kerja sehingga akan berdampak juga dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Tingkat pendidikan akan dilihat dari rata-rata lama sekolah [13].

Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu daerah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM) [14]

APK (Angka Partisipasi Kasar)

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$\frac{\text{jumlah penduduk yang masih sekolah di SD/MI}}{\text{jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\% \quad (1)$$

Catatan: APK SD/MI, APK SMP/MTs, APK SM/MA, atau APK PT.

APS (Angka Partisipasi Sekolah)

APS adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut

Rumus:

$$\frac{\text{jumlah penduduk yang masih sekolah usia 7 – 12 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\% \quad (2)$$

Catatan: kelompok usia sekolah (7-12, 13-15 tahun, 16-18 dan 19-24 tahun).

APM (Angka Partisipasi Murni)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

$$\frac{\text{jumlah murid SD/MI usia 7 – 12 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\% \quad (3)$$

Catatan: Jenjang SD/MI usia 7-12 tahun, SMP/MTs: usia 13-15 tahun, SM/MA : usia 16 -18 tahun, dan Perguruan tinggi: usia 19-24 tahun.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan indikator dan komponen penting dalam kegiatan ekonomi. Penduduk merupakan aset pembangunan yang dapat diberdayakan secara optimal. Meskipun begitu jumlah penduduk dapat menjadi “beban” dalam pembangunan apabila pemberdayaannya tidak diiringi dengan kualitas jumlah penduduk yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan. Penduduk adalah seluruh individu yang berdomisili di suatu wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan [1].

Tenaga Kerja

Simajuntak (2016) tenaga kerja adalah seseorang yang mampu melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tenaga kerja menjadi salah satu penggerak industri [15]. Tanpa adanya tenaga kerja yang berkualitas, maka terciptanya suatu sektor industri berjalan dengan baik sangatlah mustahil. Kualitas tenaga kerja akan sangat berpengaruh dalam hasil produksi. Hasil produksi merupakan salah satu pendorong pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan menekan angka kemiskinan di suatu daerah. Jumlah tenaga kerja yang besar akan meningkatkan luasnya pasar domestik [16].

Upah Minimum

Upah minimum dianggap menjadi masalah di negara berkembang [17]. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit kerja berupa uang yang dibayarkan. Upah tenaga kerja mempunyai peran penting bagi produsen dan pekerja. Bagi produsen upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan seefisien mungkin. Sedangkan pihak pekerja upah menjadi sumber penghasilan bagi dirinya, keluarga dan sumber pembelanjaan masyarakat. Besar kecilnya upah menjadi penentu taraf hidup masyarakat [18].

Metode Penelitian

Alat dan Model Analisis

Untuk mengestimasi arah dan besarnya pengaruh pendidikan, jumlah penduduk, tenaga kerja dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2017-2021, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang dinyatakan dalam model ekonometrika berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 EDUC_{it} + \beta_2 TTLPOPULATION_{it} + \beta_3 EMP_{it} + \beta_4 UMK_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

di mana:

- POV* = Kemiskinan
- EDUC* = Pendidikan
- TTLPOPULATION* = Jumlah Penduduk
- EMPLOYMENT* = Tenaga Kerja
- UMK* = Upah Minimum Kabupaten/Kota
- ε = Error Term
- β_0 = Konstanta
- $\beta_0 \dots \beta_5$ = Koefisien Regresi Variabel Independen
- i* = Menunjukkan Ke *i* di Provinsi Riau
- t* = Menunjukkan deret waktu 2017-2021

Pemilihan Model Data Panel

Menurut Juanda & Juanda (2014) ada tiga metode data panel yang dapat digunakan, yaitu Metode *Common Effect Model* (CEM) , *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) [18]. Pemilihan model data panel yang tepat dapat digunakan dengan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model CEM dan FEM. Uji Hausman memilih antara model FEM dan REM. Setelah penentuan model yang terpilih maka dilanjutkan dengan uji signifikansi.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Regresi Model Terpilih

Berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Hasil regresi *Fixed Effect Model* sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Prob.
C	4,021	2,780	1,466	0,155
PENDIDIKAN	0,059	0,050	0,239	0,239
JUMLAH PENDUDUK	0,120	0,027	4,450	0,000
TENAGA KERJA	-2,040	4,790	-0,426	0,671
UMK	-1,330	2,810	-4,747	0,000
<i>R</i> ²	0,997			
Prob <i>F</i> -stat	0,000			

Sumber: Olah data BPS , Eviews 8

Uji F

Berdasarkan Tabel 2 diatas diketahui bahwa nilai probabilitas *F*-Statistik sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05) yang berarti *H*₀ ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan, jumlah penduduk, tenaga kerja dan upah minimum kabupaten/kota secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan.

Uji Validitas Pengaruh (Uji T)

Berdasarkan Tabel 2 , diketahui bahwa nilai probabilitas t-statistik β_1 sebesar $0,239 > \alpha (0,01)$; sehingga H_0 tidak di tolak atau pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2017-2021. Kemudian β_2 nilai probabilitas t-statistik sebesar $0,000 < \alpha (0,1)$; sehingga H_0 ditolak atau jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2017-2021. Kemudian , diketahui bahwa nilai probabilitas t-statistik β_3 sebesar $0,671 > \alpha (0,1)$; sehingga H_0 tidak di tolak atau tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2017-2021. Lalu β_4 nilai probabilitas t-statistik sebesar $0,000 < \alpha (0,1)$; sehingga H_0 ditolak atau upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2017-2021.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	Koefisien	Prob.t	Kriteria	Kesimpulan
PENDIKAN	β_1	0,239	$> \alpha 0,10$	Tidak Signifikan
JUMLAH PENDUDUK	β_2	0,000	$< \alpha 0,05$	Signifikan pada $\alpha 0,05$
TENAGA KERJA	β_3	0,671	$> \alpha 0,10$	Tidak Signifikan
UMK	β_4	0,000	$< \alpha 0,05$	Signifikan pada $\alpha 0,05$

Sumber: Olah data, Eviews 8

Interpretasi koefisien Determinasi (R^2)

Interpretasi koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan seberapa mampu variasi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen. Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa koefisien determinasi bernilai 0,99. Dengan demikian, 1% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi pendidikan, jumlah penduduk, tenaga kerja dan UMK, sedangkan 34% dijelaskan oleh variabel lain diluar model

Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien 0,120 menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 Jiwa akan diikuti oleh kenaikan kemiskinan sebesar 0,12%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah et al., (2018) dalam penelitiannya tentang pengaruh pendidikan, pendapatan perkapita, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan metode data panel yang mengindikasi jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Maka perlu adanya penekanan program KB (Keluarga Berencana) serta aturan dalam mengatur usia minimal seseorang untuk menikah, yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk serta dapat menekan angka kemiskinan di Provinsi Riau [19].

Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien - 1,330 menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 1 rupiah akan diikuti oleh penurunan kemiskinan sebesar 1,33%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & Hanifa (2021) yang membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Lamongan dengan metode regresi linier berganda yang mengindikasi upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Upah minimum yang akan meningkat setiap tahun dan ditetapkan dengan menggunakan kewenangan untuk diberikan kepada pekerja. Hal ini untuk melindungi bagi pekerja supaya tidak terjebak dalam kemiskinan sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup sehingga menekan kemiskinan [20].

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi model panel menggunakan *Fixed Effect Model* dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel dependen dengan variabel independen seperti yang sudah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pendidikan , jumlah penduduk, tenaga kerja , upah minimum kabupaten secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kemiskinan. Secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan dan variabel upah minimum kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.S.i selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada orang tua saya yang senantiasa mendoakan saya dan tak lupa kepada teman-teman saya yang sudah membantu dalam penyusunan penelitian ini, dan terimakasih untuk saya sebagai penulis yang telah berjuang untuk penelitian ini.

Referensi

- [1] BPS, “Badan Pusat Statistik,” 2020. .
- [2] I. N. G. A. Saputra and N. N. Yuliarmi, “Kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua,” *E-Jurnal EP Unud*, vol. 9, no. 12, pp. 2762–2791, 2018.
- [3] Dahliah, *Globalisasi Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Kemiskinan*. Edu Publisher, 2020.
- [4] I. Maipita, *Memahami dan Mengukur Ketimpangan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2013.
- [5] Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Fakultas Ekologi Manusia IPB & Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- [6] S. Radosavljevic, L. J. Haider, S. J. Lade, and M. Schlüter, “Implications of poverty traps across levels,” *World Dev.*, vol. 144, p. 105437, 2021, doi: 10.1016/j.worlddev.2021.105437.
- [7] C. G. S. Trisnu and I. K. Sudiana, “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Bali,” *E-Jurnal EP Unud*, vol. 8, no. 11, pp. 2622–2655, 2019.
- [8] A. Erlando, F. D. Riyanto, and S. Masakazu, “Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern Indonesia,” *Heliyon*, vol. 6, no. 10, p. e05235, 2020, doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e05235.
- [9] E. Setyowati and S. T. Rahayu, “The role of shariah micro financial institution in reducing poverty,” *Test Eng. Manag.*, vol. 82, no. 2–2, pp. 2233–2241, 2020.
- [10] I. K. Sule, A. M. Yusuf, and M.-K. Salihu, “Impact of energy poverty on education inequality and infant mortality in some selected African countries,” *Energy Nexus*, vol. 5, no. November 2021, p. 100034, 2022, doi: 10.1016/j.nexus.2021.100034.
- [11] S. Khan, W. Yahong, and A. Zeeshan, “Impact of poverty and income inequality on the ecological footprint in Asian developing economies: Assessment of Sustainable Development Goals,” *Energy Reports*, vol. 8, pp. 670–679, 2022, doi: 10.1016/j.egy.2021.12.001.
- [12] M. Mihai, E. Țițan, and D. Manea, “Education and Poverty,” *Procedia Econ. Financ.*, vol. 32, no. 15, pp. 855–860, 2015, doi: 10.1016/s2212-5671(15)01532-4.
- [13] N. W. R. Suadnyani and I. B. Darsana, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bangli,” *E-Jurnal Ekon. Pembang. Univ. Udayana*, vol. 7, no. 5, pp. 1022–1049, 2018.
- [14] KEMDIKBUD, “APK-APM,” 2017. <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>.
- [15] T. R. Marselina, “Pengaruh Investasi, Unit Usaha dan Tenaga Kerja terhadap Nilai Produksi Sektor Industri di Provinsi Jambi,” *e-Jurnal Perspekt. Ekon. dan Pembang. Drh.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–12, 2016.
- [16] G. J. Siti Sholihah, Lorentino T L, “Analysis of the effect of gross domestic product (GDP) Investation, Labor on poverty level in Indonesia 2001-2010,” *J. Econ.*, vol. 1, pp. 159–167, 2010.
- [17] S. Mărginean and A. Ș. Chenic, “Effects of Raising Minimum Wage: Theory, Evidence and Future Challenges,” *Procedia Econ. Financ.*, vol. 6, no. 13, pp. 96–102, 2013, doi: 10.1016/s2212-5671(13)00119-6.
- [18] J. L. Panjawa and D. Soebagiyo, “Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran,” *J. Ekon. dan Stud. Pembang.*, vol. 15, no. 1, pp. 48–54, 2014.
- [19] E. W. Azizah, Sudarti, and H. Kusuma, “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur,” *J. Ilmu Ekon.*, vol. 2, no. 1, pp. 167–180, 2018.
- [20] S. Hanifah and N. Hanifa, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan,” vol. 1, no. 3, pp. 191–206, 2021.